

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara (Permenkes, No. 4 Tahun 2019).

Menurut PERMENKES No. 74 Tahun 2016, salah satu pelayanan kesehatan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat adalah Puskesmas. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. Salah satu pelayanan yang ada di puskesmas yaitu pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang berkaitan pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes, No 74 Tahun 2016).

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung tiga fungsi puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang

meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Permenkes, No. 74 Tahun 2016).

Kementrian kesehatan berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka disusunlah Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional. Bagi tenaga kesehatan, Formularium Nasional bermanfaat sebagai “acuan” bagi penulis resep, mengoptimalkan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya Formularium Nasional maka pasien akan mendapatkan obat terpilih yang tepat, berkhasiat, bermutu, aman dan terjangkau, sehingga akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu obat yang tercantum dalam Formularium Nasional harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya (Permenkes, No. 54 Tahun 2018).

Obat yang diresepkan harus sesuai dengan formularium nasional, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan instalasi farmasi. Apabila obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam *e-catalogue*, maka pengadaan obat dapat dilakukan secara manual (Depkes RI, 2014). Kepatuhan penggunaan formularium cukup penting agar menjamin penggunaan obat yang aman atau penggunaan obat secara rasional dan *cost effective* serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (Krisnadewi *et al.*, 2014).

Pada beberapa kasus penulisan resep yang tidak sesuai yaitu diberikannya terapi tambahan antibiotik pada penyakit ISPA Non Pneumonia. Berdasarkan teori penatalaksanaan pengobatan ISPA Non Pneumonia tidak serta merta menggunakan antibiotik, karena penyebab dari penyakit ini umumnya lebih dominan virus yang tidak memerlukan pengobatan dengan antibiotik (Putra & Wardani, 2017).

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyakit ISPA Non Pneumonia, karena Infeksi pada saluran napas merupakan penyakit yang umum terjadi pada masyarakat dan penyakit ini merupakan penyakit menular paling tinggi dilihat dari data 10 penyakit tertinggi pada tahun 2020 yang terjadi di Puskesmas X dengan jumlah total 1.535 jiwa selama tahun 2020, dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian penulisan resep dengan Formularium Puskesmas pada kasus ISPA Non Pneumonia di Puskesmas X.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana gambaran kesesuaian peresepan obat pasien terhadap Formularium Puskesmas pada kasus ISPA Non Pneumonia di Puskesmas X?”

1.3 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian yang ingin dicapai yaitu “untuk mengetahui bagaimana gambaran kesesuaian peresepan obat pasien terhadap Formularium Puskesmas pada kasus ISPA Non Pneumonia di Puskesmas X”

1.4 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian yang ingin dicapai yaitu “untuk mengetahui persentase kesesuaian peresepan obat pasien yang sesuai Formularium Puskesmas dan yang tidak sesuai Formularium Puskesmas”

1.5 Manfaat

1.5.1 Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana peresepan obat pasien pada kasus ISPA Non Pneumonia yang sesuai dengan Formularium Puskesmas.

1.5.2 Bagi Puskesmas

Sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap persepan yang sesuai dengan Formularium Puskesmas sehingga meningkatkan mutu pelayanan dan keberhasilan persepan secara optimal.

1.5.3 Bagi Institusi

Sebagai bahan informasi dalam bidang Pendidikan kesehatan dan dapat dijadikan bahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.